

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam membangun martabat bangsa dan Negara. Sehingga pendidikan merupakan sektor yang mendapatkan prioritas bagi Negara Indonesia dalam pembangunan nasional yang ditetapkannya anggaran pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan telah dibentuk Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam undang-undang ini mengamanatkan bahwa "sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan". Untuk melaksanakan dan mencapai yang diharapkan dalam undang-undang tersebut, bukan semata-mata merupakan tanggungjawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggungjawab masyarakat dan keluarga.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga ditegaskan tentang fungsi pendidikan nasional yaitu "mengembangkan kemampuan dan membentuk watak

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, maka perlu adanya pengelolaan pendidikan yang berkualitas atau bermutu. Pengelolaan pendidikan tersebut diperlukan adanya partisipasi atau peranserta masyarakat sebagai wujud dari kesadaran pemilikan masyarakat akan keberadaan lembaga pendidikan, yang kemudian mendorong menjadi rasa tanggungjawab untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas. Tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat untuk membangun pendidikan bermutu dan mandiri merupakan pengimplementasian otonomi pendidikan. Pendidikan dalam arti otonomi adalah pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pihak pemerintah dan masyarakat. Kerjasama yang baik antara penyelenggara pendidikan dan masyarakat akan mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang madani dan demokratis di bidang pendidikan. Oleh karena itu pengelolaan pendidikan yang ideal adalah penyelenggaraan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen atau stakeholder pendidikan yaitu pemerintah, sekolah meliputi kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat termasuk orang tua siswa maupun dunia usaha dan atau industri.

Upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional antara lain : 1) untuk peningkatan mutu pendidikan telah dikeluarkan standar nasional

pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui program sertifikasi, 2) untuk pemerataan kesempatan pendidikan telah dikeluarkan kebijakan wajib belajar 9 tahun, dan dana Bantuan Operasional Sekolah, bea siswa bagi keluarga miskin, 3) untuk manajemen pendidikan telah ditetapkan kebijakan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) untuk pengelolaan satuan pendidikan. Usaha-usaha pemerintah yang telah dilakukan tidak akan berhasil secara optimal tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat dan keluarga. Partisipasi masyarakat dan keluarga secara nyata sangat diharapkan dalam pengelolaan satuan pendidikan yang berada di wilayah tempat tinggal mereka. Agar partisipasi masyarakat dan keluarga tersebut dapat memberikan kontribusi yang maksimal pada pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan maka dibentuk suatu wadah yang disebut Komite Sekolah.

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai factor, seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika factor-faktor di atas dipenuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran, yaitu : Membuat ilustrasi, Mendefinisikan, Menganalisis, Mensintesis, Bertanya, Merespon, Mendengarkan, Menciptakan kepercayaan, Memberikan pandangan yang bervariasi, Menyediakan

media untuk mengkaji materi standar, Menyesuaikan metode pembelajaran, Memberikan nada perasaan. Agar pembelajaran memiliki kekuatan yang maksimal, guru-guru harus senantiasa berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat yang telah dimilikinya ketika mempelajari materi standar.

Dalam hal ini efisiensi belajar tergantung pada besarnya tingkat pengurangan dan kepuasan motif yang menyebabkan timbulnya usaha belajar individu. Prinsip penguat (reinforcer) menggunakan seluruh situasi yang memotivasi, mulai dari dorongan biologis yang merupakan kebutuhan utama seseorang sampai pada hasil-hasil yang memberikan ganjaran bagi seseorang. Jadi pada diri seseorang harus ada motif sebelum belajar terjadi atau dilakukan.

Hakekat tanggung jawab adalah menerima apa yang diwajibkan dan melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan kemampuannya atau dengan istilah lain yaitu menggunakan seluruh sumber daya untuk mengusahakan perubahan yang positif atau melaksanakan tugas-tugas dengan seluruh integritasnya. Tanggung jawab yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan nilai dan segala sesuatu yang berguna, dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Hal ini juga berkaitan dengan norma termasuk moral yang meliputi segala perilaku yang baik untuk dilakukan dan yang tidak baik untuk dilakukan. Adapun norma adalah aturan, ukuran, pokok kaidah, kadar, patokan yang dijadikan panutan bagi tingkah laku manusia guna menjamin keselamatan, ketentraman dan kesejahteraan. Tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai menerima apa yang diwajibkan dan melaksanakan tugas dengan baik selaras dengan kompetensi yang dimilikinya. Tanggung jawab merupakan nilai dasar yang tidak kalah penting

dengan nilai dasar lainnya. Beberapa kegiatan yang perlu diperhatikan, antara lain;

- a. Melaksanakan tugas piket
- b. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh seluruh tugas yang diberikan oleh sekolah
- c. Taat memakai pakain seragam sekolah yang telah ditetapkan
- d. Kebersamaan

Pengembangan dan pelaksanaan Program Kerja Tahunan SMAN 15 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016 ini merujuk pada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Kelulusan, Permendiknas Nomor 6 Tahun 2006 ( yang disempurnakan dengan Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007) Tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006, serta Panduan Penyusunan KTSP yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Program Kerja Tahunan SMAN 15 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016 adalah Program Kerja Tahunan yang disusun dan dilaksanakan oleh SMAN 15 Bandar Lampung, yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Program Kerja Tahunan ini dikembangkan oleh tim pengembang SMAN 15 B. lampung dan stakeholder lainnya, yang berisikan atas program kerja tahunan sekolah.. Masing-masing pilar tersebut keterkaitan yang sangat penting dan strategis dalam upaya mengembangkan /menggali kopetensi peserta didik.

Upaya pengembangan Program Kerja Tahunan diharapkan dapat mewujudkan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang dilaksanakan secara menyeluruh mencakup aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, kesehatan, seni dan budaya baik lokal maupun nasional. Pengembangan aspek tersebut secara khusus dapat terwujud pada kecakapan hidup melalui pencapaian kompetensi peserta didik.

## **1.2. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah peranan komite sekolah dalam mewujudkan program kerja sekolah. Dari focus penelitian dijabarkan pada sub focus sesuai dengan model evaluasi yang digunakan yaitu :

1. Peran guru dalam mewujudkan perilaku bertanggung jawab peserta didik.
2. Faktor yang mempengaruhi perilaku bertanggung jawab peserta didik.
3. Pemahaman peserta didik dalam mewujudkan perilaku bertanggung jawab.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan indentifikasi masalah, permasalahan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimanakah peran guru dalam mewujudkan perilaku bertanggung jawab peserta didik dalam pembelajaran PKn di SMA Negeri 15 Bandar Lampung pada Tahun Ajaran 2015/2016 ?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis : Peran guru dalam mewujudkan perilaku bertanggung jawab peserta didik dalam pembelajaran PKn di SMA Negeri 15 Bandar Lampung pada Tahun Ajaran 2015/2016.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep ilmu pendidikan kewarganegaraan dalam kawasan pendidikan khususnya untuk membentuk pelayanan optimal bagi sekolah dalam rangka mendukung hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis dalam penelitian ini di harapkan agar dapat digunakan sebagai:

1. Sebagai masukan untuk sekolah dalam mewujudkan perilaku bertanggung jawab peserta didik.
2. Sebagai bahan pedoman guru dalam menanamkan perilaku bertanggung jawab kepada peserta didik.
3. Sebagai sarana refleksi bagi guru dalam memperbaiki proses pembelajaran PKn.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan serta memperkaya hasana ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan bagi guru dan siswa.

## **1.6 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Ilmu**

Penelitian ini berada dalam lingkup ilmu pendidikan khususnya dalam wilayah kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan kontribusinya untuk membentuk warga Negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dalam kebudayaan politik, dan kenegaraan.

### **2. Ruang Lingkup Subjek**

Objek dalam penelitian ini adalah peran guru dalam mewujudkan perilaku bertanggung jawab peserta didik di SMA NEGERI 15 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015-2016.

### **3. Ruang Lingkup Objek**

Subyek dalam penelitian ini adalah perilaku bertanggung jawab peserta didik di SMA NEGERI 15 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016.

### **4. Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah SMA NEGERI 15 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016.

### **5. Ruang Lingkup Waktu**

Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya Surat Izin Penelitian Pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sampai selesainya penelitian ini yaitu mulai tanggal 1 April 2015 sampai 6 April 2015.